

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Andi Erham, S.E., M.M., Ph.D

Jabatan

: Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Jabatan : Oni Choiruddin, S.H., M.M.: Deputi Bidang Persidangan

selaku Deputi Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, A

PIHAK PERTAMA

Agustus 2025

PIHAK KEDUA

Oni Choiruddin, S.H., M.M.

NIP.196804291997031001

Andi Erham, S.E., M.M., Ph.D

NIP. 196512031986031008



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K_{1121})	0,2
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR		-
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama	1	-
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA		0,1
5	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	RUU Inisiatf untuk pemantauan dan	-
		Nilai tertimbang efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya (K ₂₂₂₂)	L
6	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA		-

	Kegiatan / RO			Anggaran
F	Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI	F	Rр	614.360.000,00
1	001 - Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum	F	₹p	614.360.000,00
2	003 - Rekomendasi Kebijakan Atas Penyelenggaraan Fungsi Legislasi			
3	004 - Rekomendasi kebijakan Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang- Undang dari Pemerintah dan DPR			- 1
4	005 - Rekomendasi Kebijakan pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang Lainnya			-
Per	nyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI	F	₹p	1.510.640.000,00
1	002 - Kebijakan dan Informasi Hukum	F	Rp	610.640.000,00
2	001 - Laporan Kinerja Lembaga DPD RI dan Laporan Sekretariat Jederal DPD RI	F	₹p	148.960.000,00
3	002 - Tata Kelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum	F	Rp	561.865.000,00
4	003 - Informasi Kebijakan Hukum	F	Rp	189.175.000,00
5	008 - Rekomendasi Kebijakan atas Pemantauan dan Peninjauan Undang-			-
	Lainnya			
6	Rancangan Peraturan Daerah dan			-
7	011 - Rekomendasi Isu Strategis Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah			×
	1 2 3 4 5 6	Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI 1 001 - Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum 2 003 - Rekomendasi Kebijakan Atas Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Rancangan Undang-Undang DPD RI 3 004 - Rekomendasi kebijakan Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah dan DPR 4 005 - Rekomendasi Kebijakan pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang Lainnya Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI 1 002 - Kebijakan dan Informasi Hukum 2 001 - Laporan Kinerja Lembaga DPD RI dan Laporan Sekretariat Jederal DPD RI 3 002 - Tata Kelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum 4 003 - Informasi Kebijakan Hukum 5 008 - Rekomendasi Kebijakan atas Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 6 013 - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 7 011 - Rekomendasi Isu Strategis Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan	Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI 1 001 - Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum 2 003 - Rekomendasi Kebijakan Atas Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Rancangan Undang-Undang DPD RI 3 004 - Rekomendasi kebijakan Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah dan DPR 4 005 - Rekomendasi Kebijakan pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang Lainnya Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI 1 002 - Kebijakan dan Informasi Hukum 2 001 - Laporan Kinerja Lembaga DPD RI dan Laporan Sekretariat Jederal DPD RI 3 002 - Tata Kelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum 4 003 - Informasi Kebijakan Hukum 5 008 - Rekomendasi Kebijakan atas Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 6 013 - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 7 011 - Rekomendasi Isu Strategis Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan	Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI 1 001 - Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum 2 003 - Rekomendasi Kebijakan Atas Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Rancangan Undang-Undang DPD RI 3 004 - Rekomendasi kebijakan Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah dan DPR 4 005 - Rekomendasi Kebijakan pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang Lainnya Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI 1 002 - Kebijakan dan Informasi Hukum Rp 2 001 - Laporan Kinerja Lembaga DPD RI dan Laporan Sekretariat Jederal DPD RI 3 002 - Tata Kelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum Rp 5 008 - Rekomendasi Kebijakan atas Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 6 013 - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 7 011 - Rekomendasi Isu Strategis Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan

*Catatan: Target dan anggaran yang masih kosong akan berlaku di tahun 2026

Jakarta,

Agustus 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Oni Choiruddin, S.H., M.M.

NIP.196804291997031001

Andi Erham, S.E., M.M., Ph.D

NIP. 196512031986031008